

Pemetaan Masalah, Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan BPRS di Indonesia Tahun 2010-2018

Problem Mapping, Government Strategy And Policy In Development Of Bprs In Indonesia 2010-2018

¹Inda Anggriani, ²Ima Amaliah, ³Aan Julia

^{1,2}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹indaanggi@gmail.com, ²amalia.razi@gmail.com ³mutiah_aan@yahoo.com

Abstract. Indonesia is one of the countries with a majority Muslim community. This is undeniable that the development of Islamic Banking in Indonesia is relatively fast and rapid. The success of the Islamic banking institutions in facing the economic crisis, prompted some Indonesians to switch to the Islamic economic system. The existence of a BPRS can provide banking services quickly, precisely, easily and simply to the community, especially middle, small and micro entrepreneurs both in rural and urban areas. However, at the moment the role of BPRS is decreasing due to the increasing number of commercial banks and Islamic banks, which makes BPRS outrageous. This study aims to identify, map the problems, policies and development strategies of BPRS seen from the intermediation function and financial performance of BPRS. The method used is descriptive quantitative, data collection is done by accessing the OJK and BI website. While the analysis method uses SWOT analysis to be able to find out how the development of BPRS in Indonesia. The results of the study show that the intermediary function of deposits from all BPRS in Indonesia is mostly dominated by mudharabah deposit contracts compared to other products. The Government's policy in this regard with the OJK and BI has provided a sufficiently good atmosphere for the development and health of BPRS. Although the government does not specifically determine market share for commercial banks and rural banks. So the strategy for developing BPRS is an intensive socialization approach and expanding the development of other products.

Keywords: Intermediary function, financial performance and development strategies for BPRS.

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya bermayoritas muslim. Hal ini Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tergolong cepat dan pesat. Keberhasilan institusi perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi, mendorong sebagian masyarakat Indonesia untuk beralih ke sistem ekonomi Islam. Keberadaan BPRS dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan. Namun pada saat ini kiprah BPRS menurun dikarenakan semakin banyaknya bank-bank umum dan bank syariah, itu yang membuat BPRS kalah pamor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, pemetaan permasalahan, kebijakan dan strategi pengembangan BPRS yang dilihat dari fungsi intermediasi dan kinerja keuangan BPRS. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan mengakses website OJK dan BI. Sedangkan metode analisis menggunakan analisis SWOT untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan BPRS di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi intermediasi DPK dari seluruh BPRS yang berada di Indonesia sebagian besar didominasi akad deposito mudharabah dibandingkan produk lainnya. Kebijakan Pemerintah dalam hal ini dengan pihak OJK dan BI telah memberikan atmosfer yang cukup baik bagi pengembangan dan kesehatan BPRS. Meskipun pemerintah tidak secara spesifik menentukan pangsa pasar bagi Bank Umum dan BPR. Maka strategi pengembangan BPRS adalah dengan pendekatan sosialisasi yang intensif dan memperluas perkembangan produk-produk lainnya.

Kata Kunci: Fungsi intermediasi, kinerja keuangan dan strategi pengembangan BPRS.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pionir dalam mengembangkan Perbankan Syariah di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa Perbankan Syariah di Indonesia tergolong cepat dan pesat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar ke 10, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia (Arifin, 2015). Kondisi ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk diterapkan system ekonomi berbasis syariat Islam. Maka pada Tahun 1992 diterbitkan UU tentang Perbankan yang merupakan tonggak legalitas diadopsinya Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia (Alamsyah, 2012).

Meningkatnya kebutuhan akan lembaga keuangan syariah mendorong pembiayaan berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Keberadaan BPRS dapat memberikan layanan Perbankan secara cepat, tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik dipendesaan maupun di perkotaan (Sudarajat, 2015). Menurut Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud BPRS ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jasa layanan keuangan kepada masyarakat pedesaan dan ekonomi skala menengah kecil.

Berdasarkan data dari publikasi OJK pada Tahun 2018 terungkap jumlah penghimpunan dana dari dana pihak ketiga sebesar 7,7 triliun rupiah dan pembiayaan mencapai 8,6 triliun rupiah terus meningkat setiap tahunnya, namun hal ini tidak berimbas pada jumlah BPRS pada tahun 2013-2015 yang jumlah sebelumnya berjumlah 158 unit menjadi 163 unit dan tetap konsisten sampai pada tahun 2015. Meskipun demikian perkembangan

BPRS belumlah dikatakan sesuai dengan harapan mengingat pangsa pasar BPRS sangatlah besar kepada masyarakat pedesaan dan UMKM.

Dari studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya teridentifikasi persoalan-persoalan yang hampir sama dengan yang dihadapi oleh BPRS di Indonesia. Penelitian Kamal (2014), Fasa (2013), Rosdiana, dkk (2016) menemukan persoalan utama dari BPRS adalah tidak memadainya sistem internal, kurangnya penguasaan kompleksitas perbankan syariah serta tidak adanya segmen pasar antara BPRS dan Bank Syariah. Sementara menurut penelitian OJK (2016) BPRS juga menghadapi permasalahan SDM dalam pengelolanya dan masih kurangnya dalam pengadaan IT yang handal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan BPRS di Indonesia dilihat dari aspek fungsi intermediasi dan kinerja keuangan pada tahun 2010-2018 ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan BPRS di Indonesia ?
3. Bagaimana strategi pengembangan BPRS di Indonesia dari fungsi intermediasi dan kinerja keuangan ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Pemetaan permasalahan dilihat dari fungsi intermediasi dan kinerja keuangan pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2018.
2. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan BPRS di Indonesia tahun.
3. Strategi pengembangan BPRS di

Indonesia dilihat dari fungsi intermediasi dan kinerja keuangan BPRS tahun 2010-2018.

B. Landasan Teori

Chandler (dalam Anoraga, 2004:339) strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.

Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Jumingan (2006:242) “Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi”.

Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya (Umam, 2013:242). Adapun metode menentukan tingkat kesehatan suatu bank melalui CAMELS (Kasmir, 2008), yaitu :

1. Permodalan (*Capital*)
2. Kualitas Asset (*Asset Quality*)
3. Aspek manajemen
4. Aspek Rentabilitas (*Earning*)
5. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan BPRS dapat dilihat dari fungsi intermediasinya dari pihak ketiga yang telah dihimpun. Pada tahun 2010. DPK pada BPRS di Indonesia tercatat sebesar Rp. 1,6 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2018 menjadi 7 kali lipat menjadi Rp. 7,7 triliun rupiah. Kebanyakan DPK diperoleh dari deposito mudharabah yang mencapai hampir 58% didomina.

Dari segi pembiayaan BPRS pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,06 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2018 menjadi Rp. 8,67 triliun rupiah atau meningkat tiap tahunnya sebanyak 36%.

Pada tahun 2010, alokasi pembiayaan sebesar Rp. 1,15 triliun rupiah dan sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp. 4,1 triliun rupiah. Namun angka tersebut terkalah oleh pembiayaan kepada Non-UMKM sebesar Rp. 4,4 triliun rupiah. Sementara pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, paling dominan terdapat pada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor perindustrian. Sedangkan dari kinerja keuangan BPRS dilihat dari rasio keuangan yaitu seperti ROA, CAR, NPF, ROE, FDR dan BOPO. Rasio yang bermasalah terdapat pada nilai FDR, BOPO dan NPF. Ketiga rasio tersebut selalu mengalami peningkatan yang diluar batas dari yang sudah ditentukan.

Untuk menentukan strategi pengembangan BPRS di Indonesia Tahun 2010-2018 perlu dianalisis terlebih dahulu faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternalnya yaitu ancaman dan

peluang.

A. Kekuatan

Kekuatan merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia di BPRS di Indonesia pada tahun 2010-2018 Berdasarkan data sekunder dari OJK dan BI terdapat beberapa kekuatan, sebagai berikut :

1. Pengesahan UU tentang Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum.
2. Kinerja Likuiditas BPRS bagus dilihat dalam hal ROA, ROE, CAR, FDR dan BOPO.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal karena diperkirakan kedepan. membutuhkan tenaga kerja baru.
4. Perkembangan jumlah UMKM terus meningkat karena adanya kemajuan teknologi.

B. Kelemahan

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam pengembangan BPRS di Indonesia pada tahun 2010-2018. Berdasarkan data sekunder dari OJK dan BI, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber dana pihak ketiga didominasi dana mahal (deposito mudharabah).
2. Pembiayaan yang dilihat dari akadnya masih didominasi akad murabahah (jual beli), akad musyarakah dan akad.
3. Penggunaan pembiayaan untuk alokasi UMKM.
4. Pertumbuhan kantor BPRS sangat lambat.
5. BPRS masih sulit menekan biaya penghimpunan dana yang berefek pada lembaga kompetitif bagi hasil dari pembiayaan BPRS.
6. Masyarakat hanya mencari sisi keuntungan saja dari pada memandang sistem dari akad bagi hasil dari BPRS.

7. NPF BPRS terus meningkat
8. Masyarakat masih awam menyamakan akad murabahah dengan produk pinjaman di Bank Konvensional.
9. BPRS kurang diminati oleh masyarakat di Indonesia.
10. Kurangnya SDI yang kompeten dan kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja di BPRS.
11. Kurangnya Inovasi produk.

C. Ancaman

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menyenangkan di dalam sebuah lingkungan, ancaman dalam pengembangan BPRS di Indonesia pada tahun 2010-2018 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan financial teknologi yang mendorong bank-bank besar masuk kedesa sehingga mempertinggi persaingan antara BPRS dengan bank umum.
2. Terjadinya krisis ekonomi Bank telah menurunkan aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat.
3. Penyebaran Bank Konvensional dan Bank Syariah lebih banyak dibandingkan BPRS.
4. Tidak adanya segmen pasar antara Bank Umum dengan BPRS.
5. Perkembangan populasi Bank Konvensional yang sangat signifikan semakin mempersulit ruang gerak dari BPRS.
6. Skala usaha yang kecil ditambah biaya dana yang mahal menjadikan BRPS sulit berkembang.
7. Masyarakat masih cenderung beranggapan bahwa BPRS lebih mahal dan akadnya lebih rumit dibandingkan dengan Bank Konvensional.

D. Peluang

Peluang merupakan situasi menguntungkan bagi pengembangan

BPRS di Indonesia pada tahun 2010-2018, sebagai berikut :

1. Meningkatkan literalisasi masyarakat tentang layanan industri BPRS.
2. Mendorong dan mensupport keberadaan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam yang membuka kelas perbankan syariah dan Akuntansi syariah.
3. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
4. Mengadakan sistem jemput bola untuk mendekati diri kepada masyarakat dengan cara mempermudah nasabah untuk mengakses layanan di BPRS.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Pengembangan BPRS di Indonesia Tahun 2010-2018 maka strategi yang diambil adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan media promosi BPRS dikalangan masyarakat.
3. Meningkatkan kapilitas SDM dan pengadaan IT di BPRS.
4. Meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan produk-produk baru.
5. Mengadakan sosialisasi BPRS terkait dengan pemahaman masyarakat tentang keberadaan BPRS yang lebih dari sekedar bank desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dilihat dari fungsi intermediasi dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dari seluruh BPRS yang berada di Indonesia sebagian besar didominasi akad deposito mudharabah dimana

komposisinya mencapai 58% lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan produk lainnya Ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga pada BPRS terbilang “dana mahal”. Sedangkan dalam segi pembiayaan hanya 3 kategori yang cenderung diminati oleh para nasabah BPRS, yaitu: akad murabahah, musyarakah dan mudharabah. Hal ini yang menyebabkan akad-akad dari pembiayaan lainnya kurang dikenal atau diminati. Dalam Kinerja keuangannya, rasio keuangan BPRS yang bermasalah terdapat pada rasio NPF meningkat yang berdasarkan resiko pembiayaan pada BPRS cenderung tinggi.

2. Kebijakan Pemerintah dalam hal ini dengan pihak OJK dan BI telah memberikan atmosfer yang cukup baik bagi pengembangan dan kesehatan BPRS. Meskipun pemerintah tidak secara spesifik menentukan pangsa pasar bagi Bank Umum dan BPR. Demikian kemungkinan besar BPRS akan kalah bersaing dari Bank Umum dan Bank Syariah.
3. Strategi pengembangan BPRS adalah dengan melakukan sosialisasi yang intersif melalui majelis taklim, kegiatan-kegiatan melibatkan masyarakat sehingga BPRS mampu menghimpun dana yang murah dari masyarakat. Selain itu BPRS hendaknya memperluas pemasaran produk dengan akad murabahah dan mudharabah sehingga usaha mikro kecil dapat berkembang lebih baik.

E. Saran

Diperlukannya suatu gerakan atau implikasi dari pemerintah untuk pengembang BPRS, tidak hanya

memalui kebijakan-kebijakan saja tapi dapat membantu langsung kelapangan, agar masyarakat lebih memilih BPRS dibandingkan Bank Umum dan Bank Syariah. Perlunya diadakan serempak dalam segi pendidikan mengenai mata kuliah Lembaga keuangan syariah dikarenakan masih minimnya karyawan BPRS yang bisa menguasai sistem dan struktur dari BPRS itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arifin Syamsul, 2015, "Studi Islam Kontemporer Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia", Malang; Intrans Publishing
- Bank Indonesia & IPB, 2004, "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Sumatera Selatan"
https://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/syariah/Pages/syariah_sumsel.aspx
- Bank Indonesia, 2009, Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Jakarta; Bank Indonesia
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_112309.aspx
- Bank Indonesia, 2018, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/17/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS,
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_091707.aspx
- Bank Indonesia, 2014, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016, Diakses 12 Februari 2018 jam 11.00,
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI_2016.aspx
- Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, 2008, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta
- Kamal, Kamal, 2014, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas BPRS di Indonesia pasca krisis keuangan global tahun 2008", Jurnal
- Kasmir, 2008, "Analisis Laporan keuangan", Jakarta; PT Rajagrafindo
- Latifa M Algoud Dkk, 2004, "Perbankan Syariah", Serambi; Cetakan Kedua
- Undang-undang, 2018, UU No.7/1992 Tentang Perbankan, Diakses pada 10 November 2018 Pukul 10.00
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e7920529888d369b2c313334303532.html>
- Undang-undang, 2018, UU No.10/1998 Tentang Perbankan (Perubahan) Diakses pada 10 November 2018 Pukul 10.00
<http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html>
- Rosdiana Dena dkk, 2016, Strategi Pengembangan BPR Syariah di Indonesia, Karya Ilmiah Universitas Islam Bandung, Bandung